



## KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

**PENGUMUMAN  
NOMOR 08/PENG/PIM/RH.04.02/08/2022  
TENTANG  
PENERIMAAN USULAN CALON HAKIM AD HOC HAK ASASI MANUSIA  
DI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022/2023**

Memenuhi permintaan Mahkamah Agung RI sesuai Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 26/WKMA.NY/SB/8/2022 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial mengundang warga negara terbaik untuk menjadi **Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia** yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
4. Berpendidikan paling rendah Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
8. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

**Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung RI dilakukan secara daring** melalui laman [rekrutmen.komisiyudisial.go.id](http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id) mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan 20 September 2022. Berkas persyaratan yang harus disiapkan calon adalah sebagai berikut:

1. Surat pendaftaran Calon Hakim *ad hoc* HAM di Mahkamah Agung;
2. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi;
3. Kartu Tanda Penduduk;
4. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
5. Fotokopi Ijazah Strata-1 sampai dengan pendidikan terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang Hak Asasi Manusia;
7. Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Surat rekomendasi paling sedikit dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas dan reputasi;
9. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
10. Tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
11. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
12. Pasfoto terbaru (dengan latar belakang warna merah) berukuran maksimal 100 kb diunggah di laman pendaftaran [rekrutmen.komisiyudisial.go.id](http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id);

**Berkas terkait persyaratan dipindai dan disimpan dalam format PDF** kemudian diunggah di laman [rekrutmen.komisiyudisial.go.id](http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id) paling lambat tanggal 20 September 2022.

Seleksi dilakukan secara bertahap, meliputi: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

**Ketentuan lain-lain:**

1. Panitia Seleksi **tidak menerima pendaftaran secara langsung** di Kantor Komisi Yudisial. Pertanyaan terkait pendaftaran online dan proses seleksi dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik [rekrutmen@komisiyudisial.go.id](mailto:rekrutmen@komisiyudisial.go.id) atau fasilitas chat online di laman [rekrutmen.komisiyudisial.go.id](http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id);
2. Berkas pengusulan yang sudah dikirim kepada Panitia Seleksi tidak dapat dikembalikan;
3. Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
4. Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya apapun;
5. Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi;
6. Formulir-formulir surat pernyataan dan daftar riwayat hidup dapat diunduh di laman [rekrutmen.komisiyudisial.go.id](http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id).

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Agustus 2022

**Ketua,**



**Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum**